

Kualitas Pelayanan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kedungjajang Lumajang

Rani Nurul Laili Herzegovina^{1,*}, Hayat²

^{1,2} Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia

¹ akugovina23@gmail.com, ² hayat@unisma.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2022-10-31

Revised : 2022-12-09

Accepted : 2022-12-31

Keywords

Knowledge Management;

Corporate University;

FETA;

Ministry of Finance;

ABSTRACT

Empowerment is an effort to develop the ability and independence of individuals or communities for their needs. In community empowerment, it hope to develop the knowledge, abilities and skills possessed will become asset for individuals, especially people that work in the service sector. The Kedungjajang District Office has an important role to provide some services to the community and help the Government in developing the potential for sovereignty and prosperity for the community. The purpose of this study is to determine how the quality of service in the field of community empowerment in the district of Kedungjajang Lumajang. The research method that used by researchers in this study is a qualitative approach with a descriptive method. The Kedungjajang District Office in the field of community empowerment receive a positive assessment. This is because a qualified management that build the success of village institutions has been fulfilled. The quality of service in the field of community empowerment is carried out in an effort to meet the expectations of the community. Success in the community empowerment is proven by the implementation some programs in several villages, the implementation of the Musrenbang in several villages, the implementation of the BUMDES Guidance and Monitoring Meeting, and the facilitation of the activities like Posyandu, KMPK, and MTQ, KIM, Paskibra, Porkab, Youth, and Scout caravans. . This programs can be reached by dividing the tasks in each Community Empowerment District staff and assisted by the sub-district head.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Nyata artinya melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain. Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya, (Tantan Hermansyah dkk, 2009:31).

Kantor Kecamatan mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Dalam pemberdayaan masyarakat menurut (Aziz Muslim, 2012:33) tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku. Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian. Sehingga diharapkan dalam penyadaran dan pembentukan perilaku, maka terbentuk pula pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki yang akan menjadi modal bagi individu terutama yang berkecimpung di bidang pelayanan.

Kantor Kecamatan Kedungjajang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu Pemerintahan dalam mengembangkan potensi kedaulatan dan kemakmuran bagi masyarakat. Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk layanan. Seperti layanan fasilitas dan koordinasi bantuan sosial (Bansos), Layanan Dokumen Kepegawaian, Layanan Peraturan Desa (Perdes), layanan koordinasi pemilihan kepala desa, koordinasi Trantibum, koordinasi gerakan Masyarakat, Koordinasi Hibah, Koordinasi Kemiskinan/Kekurangan dan Difabel, layanan koordinasi MTQ, pembuatan KK, pembuatan KTP, pengajuan Akta Kematian, Penerbitan Akta Lahir, serta Santunan Kematian Terpadu. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), ijin usaha Mikro Melalui Osis, rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, dispensasi nikah, rekomendasi dan pengesahaan permohonan cerai, permohonan surat guru ngaji, dan permohonan surat data rukem. Dan juga memfasilitasi Surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf. Ada banyak fungsi dan tugas lain dari kantor kecamatan. Berdasarkan data tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang Kualitas Pelayanan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kedungjajang Lumajang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2008: 145). Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari hasil penelitian yang di lakukan di Kantor Kecamatan Kedungjajang, Bidang pemberdayaan masyarakat. Mendapatkan penilaian yang positif. Di karenakan manajemen yang mumpuni dalam membangun kesuksesan kelembagaan desa sudah terpenuhi. Terbuktinya adalah terlaksananya program PKK di beberapa Desa, Terlaksananya Musrenbang di berapa desa, terlaksananya Rapat Pembinaan dan Monitoring BUMDES, dan Fasilitasi kegiatan posyandu gerbang mas, KMPK, dan kafilah MTQ, KIM, Paskibra, Porkab, Kepemudaan, dan Pramuka. Yang dimana di lakukan dengan pembagian tugas di masing-masing staf Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat dan di bantu juga oleh camat. Maka dari itu fasilitas yang di berikan cukuplah baik mulai dari surat-surat yang berlegalitas lengkap dan sarana prasarana lengkap dan penataan arsip yang sudah cukup baik.

Dalam Pemberdayaan Masyarakat terdapat kegiatan input data dan rekap data perekapan data merupakan sesuatu hal yang perlu di lakukan karena banyaknya desa yang mengajukan santunan, Sistem tata pengelolaan desa, Monev Bumdes, RPL (Rekapitulasi Proposal Lanjutan) dan input data LKJ, LPJ, dan SOP dll yang terkait dengan desa. Maka perlulah data yang akurat dalam penginputan dan perekapan. Data tersebut berbentuk PDF dan di cetak, setelah di cetak data tersebut di register di komputer dengan pencocokkan format yang sebelumnya sudah ada dan untuk perekapan juga harus membutuhkan dokumen antara lain adalah KTP dan KK. Penginputan data biasanya merupakan data surat-surat yang sudah terkumpul dalam 1 folder di jadikan surat keluar dan di masukkan arsip. Surat-surat tersebut antara lain adalah

1. Surat disabilitas data rukem, guru ngaji, dan santunan.
2. Perekapan aktivasi program kerja kepala kasi pmd, pengadministrasian umum pmd, dan tenaga upah bulanan pmd
3. Perekapan dan meregister kwitansi santunan kematian, persyaratan Bantuan Sosial Santunan Kematian yaitu:
 - a. Formulir Pendaftaran yang di isi oleh ahli waris
 - b. Fotocopy KTP, KK, dan surat Kematian yang masih berlaku dan di legalisir
 - c. Surat keterangan tidak mampu atau penerima BLT, Jamkes, atau PKH dari Kepala Desa atau Lurah
 - d. Bagi peninggal dunia akibat kecelakaan atau sebab bersifat luar biasa di lampiri surat keterangan kematian dari dokter atau surat keterangan dari kepolisian
 - e. Dalam hal ahli waris lebih dari 1 orang maka di tunjuk salah satu ahli waris dan di tuangkan dalam surat kuasa dari seluruh ahli waris lainnya.
 - f. Surat keterangan dari ahli waris di teliti dan diverifikasi keabsahannya oleh kepala desa/Lurah
 - g. Fotocopy KK baru yang meninggal & ahli waris
 - h. Pendaftaran Permohonan bantuan paling lambat 7 hari kerja sejak meninggal dan harus di terima oleh pendaftaran dinsos.

Jika dokumen yang di butuhkan dalam bantuan santunan kematian sudah lengkap dan dirasa sudah benar maka dibuatkanlah surat Cek List Persyaratan Santunan Kematian yang dimana akan di tanda tangani oleh Verifikator Kecamatan/Pengadministrasian umum, dan di berikan langsung ke pada Tenaga Upah Bulanan di dalam Kasubag. Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri. Perlu dua dokumen persyaratan santunan kematian yang harus di tanda tangani oleh Camat dan di stempel dokumen yang asli, akan tetapi tidak berlaku penyetempelan arsip, di karenakan yang asli akan di serahkan ke Kandinsos sedangkan yang satunya di jadikan arsip jika sewaktu-waktu ada masyarakat yang ingin mengambil dana bantuan tersebut.

Data Santunan yang sudah terkumpul maka di rekap menjadi satu dalam bentuk excel dikarenakan sangat berpengaruh kepada pengambilan dana santunan yang sebelumnya data perekapan

itu sudah ada kwitansi tanda bukti dana santunan, dan perekapan data santunan harus fiks dan diantarkan ke Kandinsos.

PEMBAHASAN

Kualitas Pelayanan di Kantor Kecamatan Kabupaten Lumajang

Pengertian atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan definisi - definisi yang berbeda pula. Goesth dan Davis yang dikutip Tjiptono, mengemukakan bahwa kualitas diartikan “sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.” (Tjiptono, 2004:51). Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi masa atau negara dalam Moenir (2006:17). Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggannya. Kualitas pelayanan lebih menekankan aspek kepuasan pelanggan yang diberikan oleh perusahaan yang menawarkan jasa. Keberhasilan suatu perusahaan yang bergerak di sector jasa tergantung kualitas pelayanan yang ditawarkan.

Kualitas pelayanan yang dimaksud pada penelitian ini adalah seperti layanan fasilitas dan koordinasi bantuan sosial (Bansos), Layanan Dokumen Kepegawaian, Layanan Peraturan Desa (Perdes), layanan koordinasi pemilihan kepala desa, koordinasi Trantibum, koordinasi gerakan Masyarakat, Koordinasi Hibah, Koordinasi Kemiskinan/Kekurangan dan Difabel, layanan koordinasi MTQ, pembuatan KK, pembuatan KTP, pengajuan Akta Kematian, Penerbitan Akta Lahir, serta Santunan Kematian Terpadu. Program PKK di beberapa Desa, Musrenbang di berapa desa, Pembinaan dan Monitoring BUMDES, dan Fasilitasi kegiatan posyandu gerbang mas, KMPK, kafilah MTQ, KIM, Paskibra, Porkab, Kepemudaan, dan Pramuka.

Selanjutnya untuk mengetahui Kualitas Pelayanan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kedungjajang Lumajang, penulis telah menetapkan beberapa indikator sebagai ukuran dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan adalah segala sesuatu yang menjadi sarana dan prasarana dalam berbagai aktifitas instansi yang berbentuk fisik serta dapat digunakan dalam kegiatan instansi. Fasilitas yang dimiliki kantor mempunyai manfaat yang berkelanjutan dimasa depan, serta masa manfaatnya relative permanen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Yulianto, SP selaku sekretaris kecamatan berkaitan dengan fasilitas pelayanan yang ada di kantor kecamatan mengatakan bahwa:

“Dalam proses pelayanan yang ada dikantor kecamatan ini, ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada penerima pelayanan (masyarakat), seperti adanya nomor antrian, toilet dan tempat parkir bagi masyarakat. Tersedianya beberapa fasilitas tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu faktor penunjang kualitas pelayanan yang baik yang ada dikantor kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bapak Bambang Yulianto, SP menjelaskan bahwa fasilitas yang disediakan di kantor kecamatan sudah sangat memadai dan baik, hal itu diberikan untuk pengguna pelayanan demi tercapainya proses pelayanan yang berkualitas. Lokasi tempat parkir yang dekat dari gedung kantor yaitu berkisaran 10 meter.

Berdasarkan observasi yang Penulis lakukan di lapangan, bahwa penyediaan nomor antrian dan tempat parkir yang dekat lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat surat di kantor. Oleh karena itu, masyarakat akan merasa aman untuk memarkirkan kendaraan mereka area sekitar gedung kantor, sehingga tidak akan gelisah dalam menunggu proses pelayanan yang dilakukan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain. Kinerja pemerintah daerah sebagai organisasi pemerintahan yang mengemban fungsi pemerintahan ini yang mengatur segala urusan pemerintahan daerah, baik dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, memfasilitasi harus dilakukan secara optimal. Kondisi ini yang berdampak terhadap kinerja yang dimiliki oleh aparatur birokrasi pemerintah itu sendiri, dimana budaya aparatur untuk dapat mencapai keberhasilan ini harus mempertimbangkan segala aspek untuk mencapai visi dan misi organisasi pemerintah tersebut dalam mengelola fungsi manajemen, dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga memungkinkan suatu organisasi tersebut akan mampu mengembangkan dan meningkatkan capaian organisasinya dengan optimal dengan melalui kualitas sumber daya manusiayang memiliki kompetensi di bidangnya secara terampil, kompeten dan transparan dalam bekerja sehingga menghasilkan kinerja yang sangat baik dalam keberhasilan organisasi.

Sebagai suatu proses, Jackson (1989), Labonte (1994), dan Rissel (1994) dalam (Soekidjo: 268) mengatakan, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa komponen berikut, yaitu:

- a. Pemberdayaan personal.
- b. Pengembangan kelompok kecil.
- c. Pengorganisasian masyarakat.
- d. Kemitraan.
- e. Aksi sosial dan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Yulianto, SP selaku sekretaris kecamatan, berkaitan dengan bagian pemberdayaan masyarakat yang ada di kantor kecamatan mengatakan bahwa:

“Pelayanan dalam hal pemberdayaan prinsipnya adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran dan memperluas kemampuan manusia melalui, (misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat). Seperti hal nya program PKK dan juga santunan Kematian”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bapak Bambang Yulianto, SP selaku sekretaris kecamatan menjelaskan bahwa masyarakat diharapkan mampu untuk melengkapi segala keperluan berkas yang dibutuhkan untuk pengurusan surat dan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan di Kecamatan Kedungjajang. Selain itu, masyarakat juga merasa puas dengan beberapa program yang dilaksanakan sebagai tujuan untuk mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang Penulis lakukan di lapangan, bahwa beberapa program yang akan dijalankan oleh tim pemberdayaan masyarakat antar lain program PKK di beberapa Desa, Musrenbang di beberapa desa, Rapat Pembinaan dan Monitoring BUMDES, dan Fasilitasi kegiatan posyandu gerbang mas, KMPK, dan kafilah MTQ, KIM, Paskibra, Porkab, Kepemudaan, dan Pramuka.

3. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Poerwoko (2012:110) Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, keberhasilan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan politis jenis. Lebih lanjut, Poerwoko (2012:110)

mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a. Jumlah warga yang secara nyata tertarik dalam kegiatan yang dilaksanakan
- b. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan
- d. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan
- e. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah
- f. Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
- g. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria
- h. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan
- i. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan
- j. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Yulianto, SP selaku sekretaris kecamatan, berkaitan dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang ada di kantor camat, mengatakan bahwa:

"Setiap saya memantau progress dari program yang dilaksanakan, sejauh ini jumlah warga yang tertarik dalam kegiatan lumayan banyak, kehadirannya juga dapat dikatakan hamper semua ada di setiap kegiatan. Selain itu, kemudahan pengurusan seperti hal surat menyurat dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga complain yang dating di kantor juga hampir tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bapak Bambang Yulianto, SP selaku sekretaris kecamatan menjelaskan bahwa meningkatnya kepedulian dan respon masyarakat akan dapat menunjang pelaksana program kegiatan sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa setiap pelayanan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor Kecamatan Kedungjajang memang padat, tetapi semua dapat terlayani dengan baik. Memang masih ada beberapa masyarakat yang kesulitan dalam pengurusan, tetapi hal tersebut dikarenakan masyarakat yang tidak mengenal bangku Pendidikan sehingga petugas di kantor juga mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan. Program seperti rapat dan hal internal lainnya juga dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada di kantor Kecamatan Kedungjajang.

Kegiatan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kedungjajang

1. Layanan pembuatan akta kematian

Syarat membuat Akta kematian:

- a. Surat kematian dari rumah sakit / dokter
- b. Surat kematian dari desa
- c. Fotocopy KK dan KTP pelapor yang meninggal
- d. Fotocopy surat nikah
- e. Akte kelahiran (ASLI) jika memiliki akte

Proses pembuatan akta kematian:

- a. Mengumpulkan semua berkas persyaratan
- b. Diverifikasi berkasnya terlenih dahulu
- c. Lalu menginput data tersebut
- d. Setelah diinput, diupload berkasnya
- e. Dan melakukan Pengajuan TTE (tanda tangan elektronik)
- f. Setelah TTE menunggu verifikasi dari pusat
- g. Setelah diverifikasi dari pusat baru akta kematian bisa dicetak

2. Santunan kematian

Santunan kematian merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta BPJS meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja / penyakit akibat kerja

dalam hal ini saat peserta meninggal dunia status kepesertaannya di BPJS ketenaga kerjaan tercatat masih aktif.

Persyaratan santunan kematian:

- a. Permohonan surat kematian
- b. Surat keterangan RT/RW
- c. Kis asli / surat pernyataan berisiko sosial
- d. Surat kematian asli desa
- e. Fotocopy KTP / surat keterangan Domisili yang meninggal dan ahli waris
- f. Fotocopy KK lama yang meninggal & ahli waris
- g. Fotocopy KK baru yang meninggal & ahli waris
- h. Suket merawat jika ahli waris beda KK

3. Rekomendasi Proposal

Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik. Pihak yang berkepentingan tersebut, antara lain pemberi izin dan penyumbang dana, seperti kepala sekolah, orang tua, sponsor, polisi, Jurah, atau kepala desa. Macam macam proposal:

- a. Proposal pengajuan permohonan dana untuk kegiatan pembangunan desa
- b. Proposal untuk rencana kegiatan desa
- c. Proposal untuk permintaan dana pembangunan rumah tidak layak huni. Setelah proposal di ACC oleh camat
- d. Proposal di register dan di mintai fotocopy untuk di jadikan arsip Kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi dai peneliti di lapangan, hal yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini diharapkan jumlah warga yang secara nyata tertarik dalam kegiatan yang dilaksanakan meningkat, frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan meningkat, serta tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. Selain itu, jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah juga dapat meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Kedungjajang Lumajang.

KESIMPULAN

Kantor Kecamatan Kedungjajang di bidang pemberdayaan masyarakat mendapatkan penilaian yang positif. Di karenakan manajemen yang mumpuni dalam membangun kesuksesan kelembagaan desa sudah terpenuhi. Kualitas pelayanan yang dilakukan berupaya untuk memenuhi harapan masyarakatnya. Kualitas pelayanan lebih menekankan aspek kepuasan masyarakat yang diberikan oleh bidang pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan masyarakat terbukti dengan terlaksananya program PKK di beberapa Desa, terlaksananya Musrenbang di berapa desa, terlaksananya Rapat Pembinaan dan Monitoring BUMDES, dan Fasilitasi kegiatan posyandu gerbang mas, KMPK, dan kafilah MTQ, KIM, Paskibra, Porkab, Kepemudaan, dan Pramuka. Yang dimana di lakukan dengan pembagian tugas di masing-masing staf Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat dan di bantu juga oleh camat. Maka dari itu fasilitas yang di berikan cukuplah baik mulai dari surat-surat yang berlegalitas lengkap dan sarana prasarana lengkap dan penataan arsip yang sudah cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Fandy, Tjiptono. 2004. *Manajemen Jasa, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Subianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhtadi dan Tantan Hermansyah. 2013. *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muslim, Aziz. 2012. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Najiati, Sri, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2008. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Bupati Lumajang No. 79 Tahun 2016.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.